

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 065.01.1.664848/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06
Tanggal : 23 April 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- 2. Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (664848) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- Sebesar : Rp. 9.085.725.000 (SEMBILAN MILIAR DELAPAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.90 EKONOMI LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.085.725.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 9.085.725.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

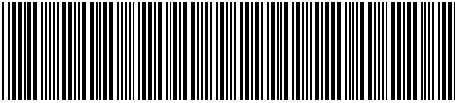
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025

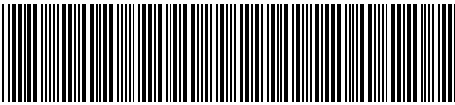


DS:3063-7268-0894-3603

Satker : (664848) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	Rp.	9.085.725.000
ED.3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Rp.	3.450.133.000
ED.3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	Rp.	2.673.342.000
ED.3215	Pemberdayaan Usaha Nasional	Rp.	2.962.250.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664848) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

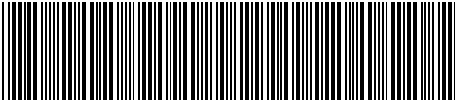
Halaman : I A. 1

Program	:	065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi				9.085.725.000
Kegiatan	:	3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal				3.450.133.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3213.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.450.133.000
Rincian Output	:	01	PBB.021	Peningkatan Daya Saing Investasi (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.520.000.000
		02	PBB.022	Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
		03	PBB.023	Sinkronisasi Kebijakan Investasi (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	430.133.000
Kegiatan	:	3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah				2.673.342.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3214.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.673.342.000
Rincian Output	:	01	FBA.021	Fasilitasi pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.673.342.000
Kegiatan	:	3215	Pemberdayaan Usaha Nasional				2.962.250.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3215.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	500,00	UMKM	2.962.250.000
Rincian Output	:	01	QDG.022	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok (PN)	500.00	UMKM	2.962.250.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025



DS:3063-7268-0894-3603

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664848) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	9.085.725.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	9.085.725.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

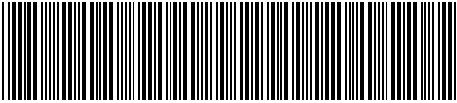
Kode>Nama Satker : (664848) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
664848	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	9.085.725	-	-	-	9.085.725	01 . 54	
065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	-	9.085.725	-	-	-	9.085.725		
3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	-	3.450.133	-	-	-	3.450.133		
3213.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.450.133	-	-	-	3.450.133		
01	RM	-	3.450.133	-	-	-	3.450.133		
3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	-	2.673.342	-	-	-	2.673.342		
3214.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.673.342	-	-	-	2.673.342		
01	RM	-	2.673.342	-	-	-	2.673.342		
3215	Pemberdayaan Usaha Nasional	-	2.962.250	-	-	-	2.962.250		
3215.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.962.250	-	-	-	2.962.250		
01	RM	-	2.962.250	-	-	-	2.962.250	088@	
JUMLAH		-	9.085.725	-	-	-	9.085.725		

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (664848) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

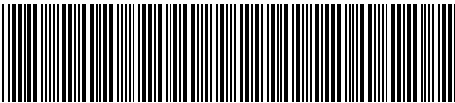
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	664848	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	55.357	396.825	73.800	242.008	121.842	197.000	380.685	225.000	208.000	663.957	6.521.251	9.085.725
		BELANJA BARANG	0	55.357	396.825	73.800	242.008	121.842	197.000	380.685	225.000	208.000	663.957	6.521.251	9.085.725
		065.01.ED.3213 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	0	0	319.670	73.800	48.385	56.842	160.000	210.685	200.000	190.000	202.757	1.987.994	3.450.133
		065.01.ED.3214 52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	319.670	73.800	48.385	56.842	160.000	210.685	200.000	190.000	202.757	1.987.994	3.450.133
		065.01.ED.3214 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	0	0	49.947	0	72.900	50.000	37.000	170.000	25.000	18.000	461.200	1.789.295	2.673.342
		065.01.ED.3215 52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	49.947	0	72.900	50.000	37.000	170.000	25.000	18.000	461.200	1.789.295	2.673.342
		065.01.ED.3215 Pemberdayaan Usaha Nasional	0	55.357	27.208	0	120.723	15.000	0	0	0	0	0	2.743.962	2.962.250
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	55.357	27.208	0	120.723	15.000	0	0	0	0	0	2.743.962	2.962.250

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025
IV A. B L O K I R



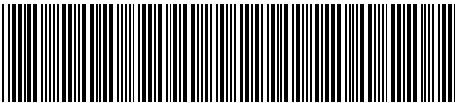
DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664848] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
664848 065.01.ED 3213 3213.PBB	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3214 3214.FBA	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 6.139.558		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 6.139.558		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.708
	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.198		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.480
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.436		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 319.678
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.466.392
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.675		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100
	522141 Belanja Sewa(RM)		Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.013
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.800		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025
IV A. B L O K I R

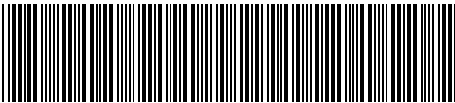


DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664848] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3215 3215.QDG	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 163.462		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.175
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		522141 Belanja Sewa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.718
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 732.063		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.354
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.400		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 965.784
3215.QDG	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 131.760		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 103.844
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
3215.QDG	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 626.893		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.550
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.032.325
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025
IV A. B L O K I R



DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664848] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

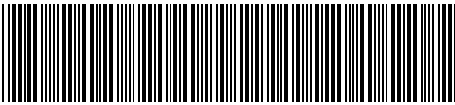
Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664848/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3063-7268-0894-3603

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664848] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002